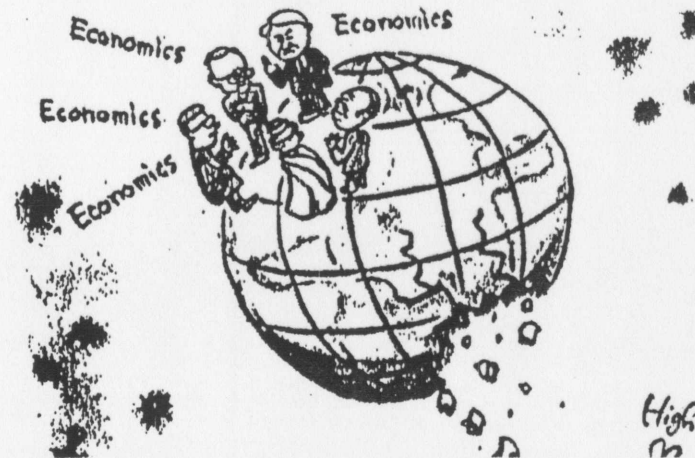


Action Plan Pengendalian Kerusakan, Pencemaran dan Upaya Pemulihan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum Hulu



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
2001

PRAKATA

Dokumen ini adalah hasil workshop pada tanggal 4 Juli 2001 yang telah diperbaharui melalui diskusi pada tanggal 1 Agustus 2001 dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Jawa Barat serta dokumen ini telah disepakati menjadi acuan program/kegiatan bagi seluruh stakeholders. Semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan sungai **CITARUM BERGEUTAR 2010** sebagai implementasi dari **one river, one plan dan one integrated management** dapat terwujud demi kelangsungan kehidupan anak cucu kita.

PEMDA JAWA BARAT

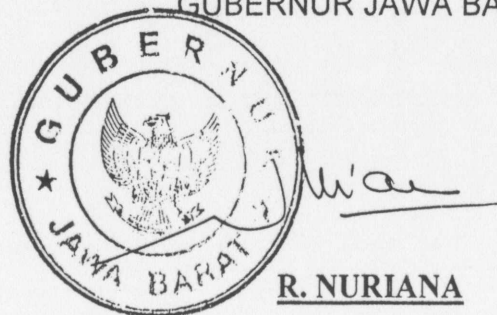
Bandung, Agustus 2001

Mengetahui,

KETUA DPRD JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT



VISI

'CITARUM BERGEUTAR 2010'

(Terwujudnya pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum Hulu yang bersih, geulis dan lestari dari dan untuk masyarakat 2010)

MISI

*M*engembangkan pengelolaan ketersediaan air baku secara memadai

*M*eningkatkan kualitas air sungai Citarum dengan mengurangi tingkat pencemaran

*M*emperbaiki proses dan kualitas penataan ruang yang berbasis ekosistem DPS Citarum

*M*engembalikan fungsi kawasan lindung khususnya di wilayah tangkapan dan resapan air

*M*eningkatkan kesadaran, kepedulian & peran masyarakat dalam melestarikan ekosistem DPS Citarum

*M*ewujudkan reformasi hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan DPS Citarum

*M*eningkatkan penegakan hukum

*M*embangun sistem jaringan data dan informasi DPS Citarum

Tim Pengarah Diskusi

Kelompok Kebijakan dan Hukum : DR.Ir. Sudjana Royat

Kelompok Pengendalian Pencemaran : DR. Nyoman Suryadiputra

Kelompok Pemulihan dan Konservasi : Ir. Yus Ruslan Achmad, MSc.

Kelompok Pemberdayaan Masyarakat : DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto

PESERTA WORKSHOP PENYUSUNAN ACTION PLAN :

Ade Ayoe MIS
Arifn Sutriano
Aryan Sukma
Asep Johni
Bambang Purwono
Bud Brahmantoyo
Budiman
Chaerul Anwar
Dadang ZH
Dadat Supriadi
Dasuta K
Deddy Hadiah
Dedi F
Dedi Kuanadi
Dedi Sumantri
Dedi Oyat Heriadi
Didi Supriadi
Didi Adji Siddik
Dodo Santana
E. Suhendar
Eko Yulianto
Eko Damayanto
Endang Rachmat
H. Otjo
Heris Bunyamin
Heryadi Wargadibrata
Hesudungan P
Helmi Gunawan
Hely MN
Henggar Herdiani
Hilmi Saifin
Ibrahim S
Idris Maxdani Kamil
Iman R
Ina Dewi K
Irfan
Ishak Chaerudin
Ita Purwanti
Yus Ruslan
Kun S. Hidayat
Kuntoro Mangkusubroto
Lies LF
Lianda L

(Dinas Perikanan Kab. Bandung)
(PT. Citra Buana)
(P C I)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(Kantor MENEQ LH)
(PU Pengairan Kab. Bandung)
(Sdg Basin Research Group/Dep. Geologi ITB)
(Dinas Perindustrian Kab. Bandung)
(Dinas Tata Kota Kota Bandung)
(FKKM Jabar/UNWIM)
(Balai KSDA Jabar)
(BPSDA Citarum)
(Dinas Kehutanan Jabar)
(IPB Bogor)
(BKSDA Jabar)
(M C C)
(Dishutbun Kab. Sumedang)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(Balai RLKT Citarum)
(Dinas PKT Kab. Bandung)
(Dinas Pertanian Tan. Pangan Jabar)
(Bapeda Propinsi Jabar)
(BBRG / Puslitbang Geotek - LIPI)
(L S M)
(Wakungan Citarum)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(Yayasan Konus)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(PU Pengairan Kab. Bandung)
(Balai Besar Sekeloa)
(PPSDAL UNPAD)
(PT. Damba Sutra)
(TL - ITB)
(Biro Hukum)
(Dinas Pertanian Tan. Pangan Prop. Jabar)
(POKLAN)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(Bapedalda Kab. Bandung)
(Distam Propinsi Jabar)
(M C C)
(M C C)
(Biro Sarana Perekonomian Prop. Jabar)
(BPLHD Propinsi Jabar)

Maksum Hidayat
M. Taufan Suranto
M. Rosano
M. Iskandar
Marnis Sutanto
Muhammad S.
Nanin Hayati Adam
Rahmat Fajar L.
Nita Nilawati Wella
Othy Mamahit
Olong Suhara
Prima Mayaningilas
R. Untung Gesang
Rachmat Dasuki
Siregar Kama
Rachmat H
Sudito
Sarah
Sudartoyo
Roma Manurung
Suleeman Daud
Royadi
Suwijanto
Tatang Mulyana
Tatang R. W
Sumpena
Tito Irianto
Rudi Hartono
Superdiono S.
Sujana Royat
Tjutu Kurniasih
Tatang Suleaman
Terry Sriwana
Tuti Aswah
Usep
Uus Mustari
U. Suyatna
Uhan S.
Wawan Darmawan
Whwin Winlati
Yopple Ahmad Soplan
Yudi Setiawan
Yusnandar

(Dinas Pengelolaan SDA Jabar)
(WALHI Jabar)
(DPU CK Kab. Bandung)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(YDIBS)
(Bakonwil Prilangan)
(Biro desentralisasi)
(PSDA ITB)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(LKHT dan SDA)
(P C I)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(BPLHD Propinsi Jabar)
(PJT II)
(Dinas Pertanian Kab. Sumedang)
(Dinas Perumahan Kota Bandung)
(Dinas Pertanian Kab. Bandung)
(Bapedalda Kab. Bandung)
(PD Kebersihan Kab. Bandung)
(PPLH ITB)
(YDIBS)
(Ditjen Bina Bangda DDN SOTDA)
(Geotek - LIPI)
(Dishutbun Kab. Sumedang)
(Bapeda Kab. Bandung)
(Bapeda Kota Bandung)
(FKL)
(POKLAN)
(M C C)
(Bapenas / PRPLH)
(Bapeda Kab. Sumedang)
(Dinas Perikanan Prop. Jabar)
(Direktorat Vulkanologi)
(Dinas Perkebunan Jabar)
(DPLH Kab. Sumedang)
(Dinas Tata Ruang Permukiman)
(Puslitbang SCA)
(Suara Lingkungan)
(Dinas Kebersihan Kab. Bandung)
(Balai Besar Tekstil)
(Wakungan Citarum)
(Perum Jasa Tirta II)
(Environmental Consulting Group/PT. Daliatek)

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, DAN UPAYA PEMULIHAN DAERAH PENGALIRAN SUNGAI (DPS) CITARUM HULU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT	PELAKSANAAN				STAKE HOLDERS	PENANGGUNG JAWAB
			1	2	3	4		
I	KEBIJAKAN DAN HUKUM							
1.1	Penyusunan detail tataruang DPS Citarum Hulu dengan skala minimal 1:10.000 (melibatkan masyarakat)	1 paket	■				P, S, M PemKab,Kota DinTarkim/Bappeda	
1.2	Review perundang-undangan/peraturan yang tidak sejalan dengan pengaturan ruang DPS Citarum Hulu	1 paket	■	■			P, S, M Bappeda/Biro Hukum	
1.3	Penyusunan PERDA pembuangan limbah (padat/cair) dengan pola insentif dan disinsentif	1 paket	■	■			P, S, M Dinas PSDA & BPLHD	
1.4	Penyusunan PERDA setiap rumah wajib dilengkapi dengan pengolahan limbah cair ataupun dapat secara komunal	1 paket	■				P, M DinTarkim & TK II	
1.5	Penyusunan PERDA/Peraturan beserta sangsi yang memadai yang melarang membuang sampah ke sungai	1 paket	■				P, S, M Pemda Kota & Kab	
1.6	Penyusunan PERDA untuk mengukuhkan kawasan-kawasan resapan air (ref.: Studi Konservasi Airtanah Daerah Bandung dan Sekitarnya, 2000 misalnya sbb: - Daerah Industri Cimahi Selatan dsk, Bdg Barat, Padalarang & Rancaekek: Zona kritis untuk a.t. 40-150 m - Kiaracondong, Cimahi Selatan, Padalarang, Rancaekek, Bandung, Majalaya: Zona rawan untuk a.t. 40-150 m)	1 paket	■	■			P, S, M PemKab,Kota BiroHK, Distam & TK II	
1.7	Penyusunan kebijakan tarif air yang sesuai dengan nilai air serta pengembangan sistem pajak air baik air permukaan maupun air tanah	1 paket	■	■			P, S, M Puslit, Distam,DinPSDA,TK II	
1.8	Penguatan kelembagaan formal/informal (termasuk pokja pengendalian pencemaran, konserasi dll.) dan penyusunan sistem pola kerjasama antar daerah atau pembentukan forum yang mewadahi koordinasi antar kabupaten/kota dalam pengembangan kebijakan/peraturan daerah secara integratif di DPS Citarum Hulu	1 paket	■	■			P, S, M, F BiroHK, BiroSosialDsr, PemKab & Kota, LSM	

Catatan: 1 = Mendesak, 2 = Jangka pendek, 3 = Jangka Menengah (10 tahun), 4 = Jangka Panjang, P = Pemerintah, S = Swasta, M = Masrkt, F = Forum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT	PELAKSANAAN				STAKE HOLDERS	PENANGGUNG JAWAB
			1	2	3	4		
1.9	Penyusunan dan penataan sistem perijinan yang terpadu di DPS Citrarum Hulu		■	■			P, S, M, F	BiroHK, BiroSosialDsr, PemKab & Kota, LSM, DinasPSDA, Distam, BPLHD, Badan Pemb. Masyarakat
1.10	Pengkajian terhadap perangkat hukum dan peraturan peraturan yang ada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum	1 paket	■	■	■		P, S, M	BiroHK & PemKot,Kab
1.11	Penyusunan strategi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang efektif	1 paket	■	■			P, S, M	
II	PENGENDALIAN PENCEMARAN							
2.1	Mereview kebijakan pengendalian pencemaran: Kepmen 51/LH/10/1995 (baku mutu), Perda 10/1995 (ijin pembuangan limbah cair), Perda 5/2001 (ijin pembuangan limbah cair) dll.	1 paket	■				P, S, M	BiroHK, DinPSDA, BPLHD
2.2	Peningkatan peranan AMDAL dalam perencanaan pembangunan secara efektif termasuk audit lingkungan	1 paket	■	■			P, S, M	BPLHD, PemKab, Kot
2.3	Pemberdayaan komisi AMDAL	1 paket	■				P, S, M	BPLHD, PemKab, Kot
2.4	Peningkatan strategi pengawasan pelaksanaan RKL/RPL secara efektif dan efisien serta penerapan sanksi bagi yang melanggarnya	1 paket	■	■			P, S, M	BPLHD, PemKab, Kot BiroHK
2.5	Inventarisasi sumber pencemar (padat & cair ataupun point source & non-point source): domestik, industri, pertanian (perikanan), peternakan, pertambangan dll. (data up-date)	1 paket	■	■	■	■	P, S	PuslitAir, DinPSDA, BPLHD, Kab & Kota
2.6	Menyusun FS untuk IPAL gabungan baik untuk domestik ataupun industri yang disesuaikan dengan prioritas beban dan daya tampung sungai/anak sungainya Catatan: Untuk FS cluster Cimahi Selatan dan Majalaya sudah ada Sedangkan 4 cluster lainnya (Banjaran, Bdg Timur, Rancaekek, Padalarang) belum ada. Untuk IPAL domestik komunal Cikapundung FS-nya akan dilaksanakan dari program WJEMP 2001	4 paket	■	■			P, S, F	PuslitAir, DinTarkim, BPLHD, Industri, PemKab & Kota
2.7	Pembangunan IPAL gabungan untuk RT dan Industri	1 paket	■	■	■	■	P, S	Swasta

Catatan: 1 = Mendesak, 2 = Jangka pendek, 3 = Jangka Menengah (10 tahun), 4 = Jangka Panjang, P = Pemerintah, S = Swasta, M = Masrkt, F = Forum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT	PELAKSANAAN				STAKE HOLDERS	PENANGGUNG JAWAB (untuk dikoreksi)
			1	2	3	4		
2.8	Penerapan dan sosialisasi program ecoefisiensi (produksi) untuk seluruh sektor pembangunan	1 paket	■	■	■	■	P, S, M, F	Seluruh sektor terkait
2.9	Perumusan dan penyusunan penerapan environmental fee	1 paket	■	■	■	■	P, S, M, F	Puslit, BPLHD, ?
2.10	Peningkatan kemampuan operator IPAL (pelatihan operator IPAL apabila perlu dibuat sistem sertifikasi)	1 paket	■	■			P, S, F	Asosiasi, BPLHD, ?
2.11	Sosialisasi penyadaran lingkungan hidup bagi penduduk, karyawan dan manajer pabrik	1 paket	■	■	■	■	P, S, M, F	BPLHD, Industri, LSM
2.12	Peningkatan kinerja laboratorium lingkungan (pembinaan dan pengawasan unt akreditasi laboratorium)	1 paket	■	■			P, S	BPLHD, Pusarpedal, TkII
2.13	Review kriteria PROPER Prokasih serta pengembangan untuk jenis limbah lainnya	1 paket	■	■			P, S	BPLHD, Bapedal, Tk II
2.14	Menyusun peraturan yang menekankan kepada kewajiban meningkatkan kinerja IPAL	1 paket	■	■			P, S, F	BPLHD, Ind, LSM, TkII
2.15	Membuat papan pengumuman tentang kualitas air sungai	1 paket	■	■	■	■	P, S, M, F	PemKab/Kota
2.16	Peningkatan pelayanan/penanganan limbah padat (sampah)	1 paket	■	■	■	■	P, S, M	PD.Keb,DinKeb,LSM
2.17	Menetapkan dan membuat stasiun monitoring baik untuk curah hujan, debit dan kualitas air secara permanen serta menetapkan frekuensi, metoda sampling untuk mendukung kajian sebagai bahan kebijakan lebih lanjut	1 paket	■	■			P, F	Puslit, BPLHD
2.18	Penghitungan daya tampung sungai/anak sungai sebagai pertimbangan untuk meriview standar baku mutu yang akan diberlakukan bagi setiap sungai/anak sungai	1 paket	■	■	■	■	P, S, M, F	Puslit, BPLHD
2.19	Penetapan batas garis sempadan sungai untuk sungai Citarum Hulu beserta anak-anak sungainya	1 paket	■	■			P, S, M, F	Puslit, Dinas Terkait, PemKab & Kot

Catatan: 1 = Mendesak, 2 = Jangka pendek, 3 = Jangka Menengah (10 tahun), 4 = Jangka Panjang, P = Pemerintah, S = Swasta, M = Masrkt, F = Forum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT	TAHUN				STAKE HOLDERS	PENANGGUNG JAWAB
			1	2	3	4		
III	PEMULIHAN DAN KONSERVASI							
	Pemulihan dan konservasi di DPS Citarum Hulu didasarkan kpd tingkat kekritisan lahan (ref.: RLKT, 1987 & Citarik, PCI, 1997) ytd: Citarik, Cikapundung, Cisangkuy, Cirasea, Ciwidey, Cihaur & Ciminyak							
3.1	Delineasi & kuantifikasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan lindung	1 paket	■				P, S, M, F	Dinas PKT
3.2	Perlindungan & konservasi lahan resapan air (Ref.: Studi GTL CTA-108, 1992/Konservasi airtanah, 2000)	1 paket	■	■			P, S, M, F	Dinas Kehut, BPLHD Prop, Kab & Kota
3.3	Konservasi hutan/kebun	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas PKT
	- pembangunan teras	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas PKT, DinHut
	- pengembangan pola hutan	1 paket	■	■			P, S, M	DinHut, Pert & Keb
	- pengembangan pola agroforestry	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas PKT & Din Ket
	- perbaikan pola pertanian lahan kering	1 paket	■	■	■	■	P, S, M	Pemda Kab/Kota
	- konservasi pada lahan permukiman	1 paket	■	■	■	■	P, S, M	Pemda Kab/Kota
3.4	Pengembangan bangunan konservasi	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas PSDA, Dinas PKT
	- pembuatan dam pengendali (untuk mengendalikan erosi)	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas PSDA, Dinas PKT
	- perlindungan tebing sungai	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas PSDA, Dinas PKT
	- dll.							
3.5	Pengembangan usaha tani & aktifitas pendukung	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas Pertanian & Perkeb
	- pengadaan benih	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas Pertanian & Perkeb
	- pengadaan pupuk	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas Pertanian & Perkeb
	- pembibitan	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas Pertanian & Perkeb
	- model pengembangan hutan desa berdasarkan pola kearifan tradisional	1 paket	■	■			P, S, M	DinHut & Perkeb, BPLHD
	- pengembangan kolam ikan, dll.	1 paket	■	■			P, S, M	Dinas Perikanan
3.6	Penyusunan konsep 'take & give' daerah hulu-hilir	1 paket	■	■			P, S, M, F	Pemda Prop, Kab & Kota
3.7	Penanganan sedimen organik di dasar sungai termasuk di waduk saguling	1 paket	■	■			P, S, M	PLN
3.8	Penanganan gulma air	1 paket	■	■			P, S, M	PLN, LSM
3.9	Penertiban dan pengaturan jaring apung di sungai/waduk	1 paket	■	■			P, M	Dinas Perikanan, PLN

Catatan: 1 = Mendesak, 2 = Jangka pendek, 3 = Jangka Menengah (10 tahun), 4 = Jangka Panjang, P = Pemerintah, S = Swasta, M = Masrkt, F = Forum

